

BAB: I

SELAYANG PANDANG KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA

(Oemar Hamalik dan Sholeh Hidayat)

A. Latar Belakang

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, seperti yang dikatakan oleh Prof. Rupert. C. Lodge, yaitu *“in this sence, life is education, and education is life”*. Artinya, seluruh kehidupan memiliki nilai pendidikan karena kehidupan memberikan pengaruh kepada pendidikan bagi seseorang atau masyarakat. Berkaitan itu pula menurut salah seorang tokoh pendidikan pembebasan yaitu Paulo Freire bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Membicarakan orientasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang tujuan hidup manusia. Manusia merupakan makhluk yang senantiasa mengarahkan hidupnya sesuai dengan tujuan. Realitas kehidupan sarat dengan persoalan. Persoalan ‘asal mula’, ‘tujuan’ dan ‘eksistensi’. Oleh karena itu membangun kemajuan manusia ke depan sangat bergantung realitas kehidupan untuk tujuan pendidikan yang rencanakan.

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi, yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berlangsung secara berbarengan.

Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan sesuai arah tujuan pendidikan. Tentu saja tujuan pendidikan tersebut adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pendidikan untuk berbagai level dan tingkat satuan pendidikan disusun pada suatu program secara terencana dan sistematis ke dalam kurikulum. Maka dari itu ketika pendidikan diharapkan menjadi sarana dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia, haruslah tersusun secara *“apik dan metodik”*, yakni tersusun secara sistematis dalam bentuk kurikulum.

Berangkat dari latar belakang konsep berpikir di atas, maka kurikulum di Indonesia mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai *instrumental input* untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan manusia di Indonesia harus sesuai dengan falsafah hidup bangsa sehingga dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional.

B. Pengertian Kurikulum Pendidikan

Para ahli kurikulum terdapat perbedaan dalam memberikan definisinya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sudut pandang atau sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar bersangkutan yang berlainan. Atas pemikiran atau tafsiran masing-masing yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Sekalipun masing-masing definisi mengandung kebenaran, ada baiknya dicoba menemukan di antara berbagai definisi, definisi manakah yang paling tepat yang dapat dijadikan sebagai pegangan di dalam pembahasan berikutnya.

Istilah "kurikulum" muncul untuk pertama kalinya dan digunakan dalam bidang olahraga. Secara etimologi *curriculum* yang berasal dari Bahasa Yunani yakni "Curriculae", yaitu *curir* yang artinya "pelari" dan *curere* yang berarti "tempat berpacu". Pada zaman Yunani Kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai garis *finish*. Karena itulah istilah *curriculum* diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari.

Baru pada tahun 1855, istilah *curriculum* digunakan dalam dunia pendidikan, maka pada waktu itu pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam artian juga bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran dalam suatu jenjang pendidikan, misalnya ditempuh atau dipelajari murid di sekolah atau mahasiswa pada perguruan tinggi, bahkan sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan, departemen atau lembaga kursus. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa, mahasiswa atau peserta dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Beberapa tafsiran lainnya di-

kemukakan berikut ini.

Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran (subject matter) dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau, yang telah disusun secara sistematis dan logis. Misalnya, berkat pengalaman dan penemuan-penemuan masa lampau, maka diadakan pemilihan dan selanjutnya disusun secara sistematis, artinya menurut urutan tertentu, dan logis, artinya dapat diterima oleh akal dan pikiran. Mata ajaran tersebut mengisi materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa, sehingga memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang berguna baginya. Semakin banyak pengalaman dan penemuan-penemuan, maka semakin banyak pula mata ajaran yang harus disusun dalam kurikulum dan harus dipelajari oleh siswa di sekolah.

Kurikulum sebagai Rencana Pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya, suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata ajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti: bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain, yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif. Semua kesempatan dan kegiatan yang akan dan perlu dilakukan oleh siswa direncanakan dalam suatu kurikulum. Suatu pendapat sehubungan dengan konsep tersebut, sebagai berikut:

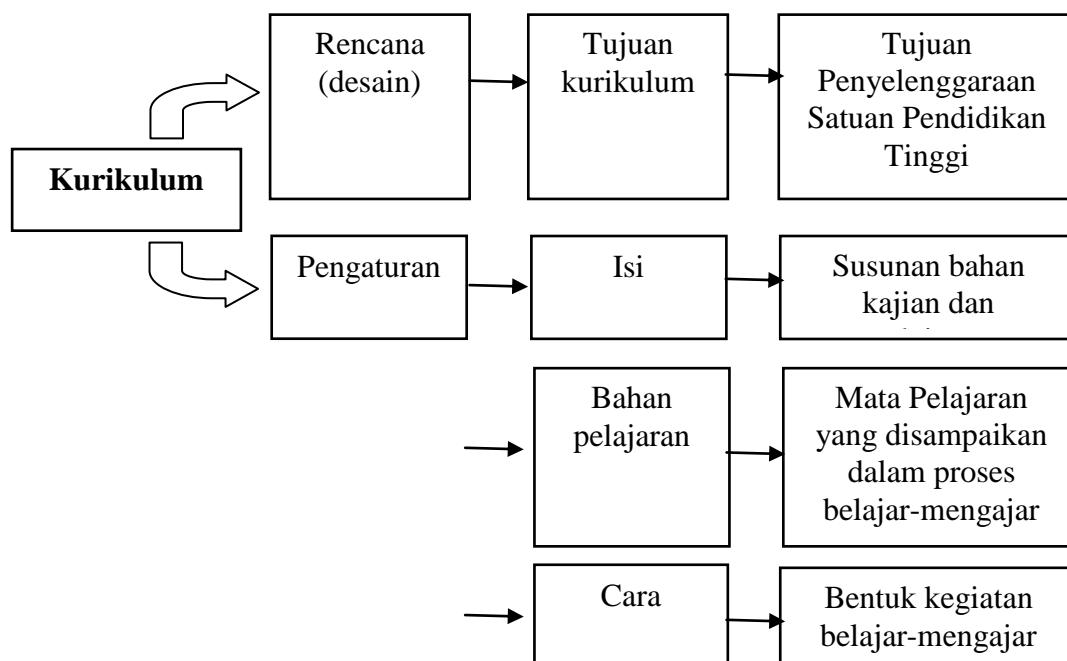
The curriculum is as broad and varied as the child's school environment. Broadly conceived, the curriculum embraces not only subject matter but also various aspects of the physical and social environment. The school brings the child with his impelling flow of experiences into an environment consisting of school facilities, subject matter, other children, and teachers. From interaction or the child with these elements learning results. (Douglass,.....). Hal ini berarti, semua hal dan semua orang yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada siswa termasuk ke dalam kurikulum.

Kurikulum sebagai Pengalaman Belajar. Perumusan/pengertian kurikulum lainnya yang agak berbeda dengan pengertian-pengertian sebelumnya lebih menekankan bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar. Salah satu pendukung dari pandangan ini menyatakan sebagai berikut:

Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not (Romine, 1945, h. 14). Pengertian ini menunjukkan, bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan

mencakup juga kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tak ada pemisahan yang tegas antara intra dan ekstra kurikulum. Semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar/pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional pengertian kurikulum dapat dilihat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) pasal 1 aya (9), ialah "seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Pada makna kurikulum dalam undang-undang tersebut adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi: kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan, dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Barangkali akan lebih jelas bila digambarkan sebagai berikut:



C. Jejak Singkat Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Sejak berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berulang kali merumuskan dan mengembangkan kurikulum pendidikan. Berbagai kurikulum yang pernah diberlakukan dan digunakan dalam tonggak sejarah kependidikan kita. Berikut secara berurut masa-masa sejarah perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia, yakni:

1. Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan

Pendidikan pada era pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. Hasilnya pendidikan kala itu bahwa bangsa ini dididik untuk mengabdikan kepada penjajah. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah. Ini merupakan gambaran pendidikan rendah di Indonesia sejak masa penjajahan oleh Bangsa Belanda yang berlangsung hingga tahun 1942 sebagai masa berakhirnya penjajahan.

2. Kurikulum Pendidikan Masa Orde Lama

Pada era Orde Lama terjadi 3 kali pengembangan kurikulum, 2 kurikulum yang sempat diberlakukan secara efektif. Kemudian diakhir masa era ini terjadi lagi perubahan kurikulum di antaranya:

a. Kurikulum 1947 (Rencana Pelajaran 1947)

Kurikulum 1947 yang pertama ini lahir setelah Indonesia merdeka yang disebut 'rencana pelajaran' (dalam bahasa Belanda adalah *leer plan*). Kurikulum ini dengan asas pendidikan ditetapkan Pancasila dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda menuju untuk kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Rencana Pelajaran 1947 merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dengan mengurangi pendidikan kecerdasan intelektual. Kurikulum 1947 dilandasi kehidupan berbangsa dengan spirit merebut kemerdekaan, maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, kesadaran bernegara dan masyarakat.

Materi pelajaran dalam Rencana Pelajaran 1947 dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap pendidikan kesenian dan pendidikan jasmani. Rencana Pelajaran 1947 yang resminya 1950 itu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Bentuk kurikulum ini memuat dua hal pokok: semangat zaman dan suasana daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, disertai dengan garis-garis besar pengajaran.

b. Kurikulum 1952 (Rencana Pelajaran Terurai 1952)

Kurikulum lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut "Rencana Pelajaran Terurai 1952". Sistem pendidikan masa ini dikenal dengan Sistem Panca Wardana atau sistem lima aspek perkembangan yaitu perkembangan moral, perkembangan intelegensia, perkembangan emosional/artistik, perkembangan keprigelan dan perkembangan jasmaniah. Fokus kurikulum

1964 ini lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum masa ini dikategorikan sebagai *Correlated Curriculum*.

Pasca Kurikulum 1947 di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1952. Pada tahun ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Kurikulum SD yang lebih merinci setiap mata pelajaran kemudian diberi nama 'Rencana Pelajaran Terurai 1952' yang berfungsi membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di Sekolah Dasar. Di dalamnya tercantum jenis-jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dalam belajar di sekolah, seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah. Pelajaran Bahasa Indonesia baru diberikan pada kelas tiga dan terbagi atas: bercakap-cakap, membaca, bahasa dan mengarang. Dalam pelajaran Bahasa Daerah diberikan pelajaran membaca dalam huruf daerah seperti huruf Jawa bagi murid di Jawa atau Bahasa Bugis dan Makassar bagi murid di daerah Bugis atau Makassar dan dimulai sejak kelas dua tengah tahun kedua. Pelajaran berhitung terbagi atas hitung angka, ilmu bangun dan mencongak. Sedangkan, pelajaran Ilmu Hayat, yakni terdiri atas Ilmu Tubuh Manusia, Ilmu Tumbuh-tumbuhan dan Ilmu Hewan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran sehari-hari. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran.

c. Kurikulum 1964 (Rencana Pendidikan 1964)

Kurikulum pada penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu menjelang tahun 1964, yang diberi nama 'Rencana Pendidikan 1964' atau Kurikulum 1964. Di penghujung era ini pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004).

Fokus kurikulum 1964 ini pada pengembangan Pancawardhana, yaitu: a) Daya cipta, b) Rasa, c) Karsa, d) Karya, dan e) Moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

3. Kurikulum Pendidikan Era Orde Baru

Kurikulum pada era Orde Baru terjadi 4 kali kurikulum diadakan perubahan dan pengembangan. Adapun kurikulum yang dimaksud adalah:

a. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan tonggak awal pendidikan masa orde baru. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Lahirnya Kurikulum 1968 sebagai perubahan dari Kurikulum 1964 dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari pemerintahan rezim Orde Lama ke rezim pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 menggantikan Rencana Pendidikan 1964 untuk mengganti produk Orde Lama. Dalam perubahan ini dari struktur kurikulum Pancawardhana yang menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Jumlah jam pelajarannya terdiri dari 9 mata pelajaran. Titik berat kurikulum ini terletak pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

b. Kurikulum 1975

Pembaruan kurikulum yang ke-5 terjadi dengan diterbitkannya Kurikulum 1975/1976. Kurikulum 1975 untuk SD/SMP dan SMA sedangkan Kurikulum 1976 untuk Sekolah Keguruan yaitu SPG dan Sekolah Menengah Kejuruan (STM, SMEA).

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (*management by objective*). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung “*process skill approach*”. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Sementara dasar dan tujuan pendidikan sama dengan kurikulum 1975. Beberapa hal yang mendasari dimunculkannya perubahan kurikulum ini sebagai berikut.

1. Latar Belakang

Latar belakang ditetapkan kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah sebagai berikut:

- a. Sejak Tahun 1969 di Negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional, yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Hal-hal yang mempengaruhi program maupun kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaharuan itu adalah: 1) Selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 2) Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi: "Mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan; 3) Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional; 4) Adanya inovasi dalam sistem belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia; dan 5) Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku;
- b. Pada Kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap Kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

2. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti Kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: a). Berorientasi pada tujuan; b). Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integrative; c). Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu; d). Menganut pendekatan sistem yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dipengaruhi psikologi behaviorisme dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill).

3. Komponen Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur: a). Tujuan institusional baik SD, SMP, dan SMA/SPG/SMEA STM tujuan institusional adalah tujuan yang hendak

dicapai lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA/SPG/SMEA/STM) dalam melaksanakan program pendidikannya; b). Struktur program Kurikulum Struktur program adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap sekolah; c). Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), sesuai dengan namanya, GBPP pada bagian ini dimuat hal-hal yang berhubungan dengan program pengajaran, yaitu: **Tujuan Kurikuler**, yaitu tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan. **Tujuan Instruksional Umum**, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap satuan pelajaran baik dalam satu semester maupun satu tahun. Sedangkan, **Pokok Bahasan** harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Urutan penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya dan dari semester satu ke semester berikutnya.

4. Sistem Penyajian dengan Pendekatan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI)

Sistem PPSI berpandangan bahwa proses belajar-mengajar merupakan suatu sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaharuan dalam sistem pengajaran di Indonesia.

5. Sistem Penilaian dengan Melaksanakan PPSI

Penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja.

6. Sistem Bimbingan dan Penyuluhan

Setiap siswa memiliki tingkat kecepatan belajar yang tidak sama. Di samping itu mereka memerlukan pengarahan yang akan mengembangkan mereka menjadi manusia yang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dalam kaitan ini maka perlu adanya bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa dalam meniti hidupnya meraih masa depan yang diharapkan.

7. Supervisi dan Administrasi

Sebagai suatu lembaga pendidikan memerlukan pengelola yang terarah, baik yang digunakan oleh para guru, administrator sekolah, maupun para pengawas sekolah. Teknik supervisi dan administrasi sekolah ini dapat dipelajari pada Pedoman pelaksana Kurikulum tentang supervisi dan administrasi. Ketujuh unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang mewarnai Kurikulum 1975/1976 sebagai suatu sistem pengajaran Sejak diberlakukannya Kurikulum 1975/1976, berbagai usaha

inovatif telah banyak dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan dan mencari alternatif lain yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut, antara lain meneruskan uji coba kurikulum melalui Sekolah Laboratorium di sepuluh IKIP Negeri yang kini berubah menjadi Universitas Negeri, uji coba belajar tuntas (*mastery learning*), penggunaan modul dan sekolah-sekolah terbuka.

c. Kurikulum 1984

Lahirnya Kurikulum 1984 disebabkan karena Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam GBHN 1983 hasil Sidang Umum MPR 1983 menyiratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 kepada kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian Kurikulum 1975 menjadi Kurikulum 1984. Secara umum dasar perubahan Kurikulum 1975 ke Kurikulum 1984 di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Terdapat ketidak serasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik.
- 3) Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah.

Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah. Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Atas dasar perkembangan itu maka menjelang tahun 1983 antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan/ teknologi terhadap pendidikan, Kurikulum 1975 dianggap sudah tidak sesuai lagi karena itu diperlukan perubahan kurikulum dan lahirlah Kurikulum 1984 sebagai perbaikan atau revisi. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berorientasi kepada tujuan pembelajaran (instruksional). Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.

- 2) Pendekatan pembelajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara optimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
- 3) Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengernasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.
- 4) Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pemahaman siswa, alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
- 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju ke kompleks.
- 6) Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar dan pembelajaran yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran.

d. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sementara materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pembelajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar, kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena sesuai dengan suasana pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Akibatnya, pada saat itu dibentuklah Tim *Basic Science* yang salah satu tugasnya ikut

nengembangkan kurikulum di sekolah. Tim ini memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus diberikan cukup banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti pelajaran pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak.

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan.
- 2) Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
- 3) Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.
- 5) Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.
- 6) Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

Selama dilaksanakannya Kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut:

- 1) Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran,

- 2) Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan Kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu:

- 1) Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat.
- 2) Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta pendukungnya.
- 3) Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
- 4) Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran.
- 5) Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Penyempurnaan kurikulum 1994 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang.

4. Kurikulum Pendidikan pada Era Reformasi

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi” (KBK). Itulah yang mendasari kemunculan KBK dan kemudian dipandang perlu penyempurnaan lagi lahirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta Kurikulum 2013 (K13).

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (2002 – 2004)

Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat kurikulum. Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan inovasi di bidang

kurikulum. Kurikulum 1994 perlu disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2002 sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik pendidikan adalah melakukan inovasi sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kurikulum yang dikembangkan saat ini diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. *Competency Based Education is education geared toward preparing individuals to perform identified competencies* (Scharg dalam Hamalik, 2000). Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran.

Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soejadi (1994). Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu peran guru diposisikan kembali sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi.

Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang, maka pendidikan di sekolah dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu (Puskur, 2002a). Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks.
- 2) Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten.

- 3) Kompetensi merupakan hasil belajar (*learning outcomes*) yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setc proses pembelajaran.
- 4) Keandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang terukur (Puskur: 2002).

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum KBK pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya (Puskur: 2000).

Rumusan kompetensi dalam kurikulum KBK merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah/madrasah dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

Suatu program pendidikan berbasis kompetensi mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Pemilihan kompetensi yang sesuai;
- 2) Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi;
- 3) Pengembangan sistem pembelajaran.

Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri penekanan, orientasi, pendekatan, sumber belajar lebih luas, penilaian proses dan hasil sebagai berikut (Puskur, 2002a):

- 1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
- 2) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
- 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- 4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
- 5) Penilaian menckankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Struktur kompetensi dalam kurikulum KBK pada suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi (kemampuan) dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Dapat dilihat contohnya dalam mata pelajaran Seni-Budaya. Standar kormpetensi mata pelajaran Seni Budaya

merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berkarya, dan sikap positif terhadap Seni-Budaya. Kompetensi dasar Seni Budaya merupakan pernyataan kemampuan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau sub aspek mata pelajaran Seni-Budaya. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni-Budaya merupakan gambaran kompetensi yang seharusnya dipahami, diketahui, dan dilakukan siswa sebagai hasil pembelajaran mata pelajaran tersebut. Kompetensi dasar tersebut dirumuskan untuk mencapai penguasaan pengetahuan, keterampilan berkarya, dan sikap positif terhadap kesenian (Seni-Budaya).

Struktur kompetensi dasar kurikulum KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, "Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?" Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, "Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?". Guru akan menggunakan indikator sebagai dasar untuk menilai apakah siswa telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Indikator bukan berarti dirumuskan dengan rentang yang sempit, yaitu tidak dimaksudkan untuk membatasi berbagai aktivitas pembelajaran siswa, juga tidak dimaksudkan untuk menentukan bagaimana guru melakukan penilaian. Misalnya, jika indikator menyatakan bahwa siswa mampu menjelaskan konsep atau gagasan tertentu, maka ini dapat ditunjukkan dengan kegiatan menulis, presentasi, atau melalui kinerja atau melakukan tugas lainnya.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahraga dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi

sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diturunkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, standar pembiayaan dan (7) standar penilaian pendidikan.

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah mendorong penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Secara substansial, pemberlakuan kurikulum KTSP lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah *subject matter*), yaitu:

- 1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
- 2) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
- 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- 4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
- 5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Kurikulum yang disingkat KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi sebelumnya (versi 2002 dan 2004), sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang

telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya.

c. Kurikulum 2013 (K13)

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP, pada kurikulum ini biasa disingkat dengan istilah K13. Kurikulum tersebut merupakan kurikulum terakhir yang kini sedang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya akan dipahami secara mendalam dan dibahas dengan suatu kajian telaah pada bab selanjutnya.